



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PD. BPR BKK TASIKMADU
TAHUN 2018

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi,
- Akuntabilitas,
- Pertanggungjawaban,
- Independensi, dan
- Kewajaran.

Manajemen PD. BPR BKK Tasikmadu berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PD. BPR BKK Tasikmadu disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2018:

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
- H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- K. Jumlah Penyimpangan Intern
- L. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerima Dana
- O. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

PD. BPR BKK Tasikmadu diurus dan dipimpin oleh 3 (tiga) orang Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Direksi berjumlah 3 (tiga) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Pengangkatan Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dan dinotariikan pada Notaris Teuku Arif Rahman, SH No. 232 tanggal 27 Maret 2015.

Masa jabatan anggota Direksi adalah 4 (empat) tahun dan untuk periode ini akan berakhir pada tahun 2019.

Pada tahun 2018 tidak ada perubahan susunan Direksi, sehingga susunan Direksi selengkapnya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	DIDIK DARMADI, SE. MM.	Direktur Utama	18/03/2015- 17/03/2019
2	LUGITO, SE.MM.	Direktur Umum	18/03/2015- 17/03/2019
3	SRI UTAMI ISTIJANI, SE.	Direktur Pemasaran	18/03/2015- 17/03/2019

- Seluruh Anggota Direksi telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Direktur BPR dan masih berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi kepatuhan
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

1. Refreshmen dengan OJK
2. Workshop Komunikasi PERBARINDO Solo Raya
3. Pembekalan & Ujian Manris LV. 3
4. Penerapan & Pelaporan Manris
5. Pelatihan Penyegaran Direksi Tahap 1
6. Pelatihan Penyegaran Direksi Tahap 3
7. Sosialisasi Akses Info Keuanagn
8. Pelatihan Penyegaran Direktur Tahap 2
9. Workshop Laporan Pengawasan RBB
10. Reg Trait s of effctife doc Credit
11. froud control plan
12. Sertif menrisk Level III
13. sosialisasi Struktur Data implikasi labul BPR
14. munas x dan seminar nas 2018
15. Workshop dan seminar pengelolaan BUMD

Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah berupaya melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris sbb:

1. Pemaparan RKAT kepada pegawai dan menyampaikan laporan RBB sesuai rekomendasi Dewan Pengawas.
2. Meningkatkan Penghimpunan dana dengan cara memberikan Hadiah langsung kepada nasabah penabung baru
3. Menindak tegas pegawai yang melakukan Fraud
4. Melaksanakan monitoring Evaluasi kinerja capaian RKAT 2018
5. Melaksanakan Undian Simpanan
6. Melaksanakan tata cara penjualan dan penghapusan inventaris.
7. Memberikan Tunjangan Jabatan sesuai Capaian kinerja
8. Melaksanakan rehab gedung KC. Jenawi, KC. Ngargoyoso dan pembangunan gedung KC. Jumantono

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas PD. BPR BKK Tasikmadu terdiri dari 2(dua) orang Anggota Dewan Pengawas, seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas. Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Dewan Pengawas berjumlah 2(dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Akta Notaris nomor 115 tanggal 21 Oktober 2015 Notaris Teuku Arif Rahman, SH., telah diperbaharui dengan Akta Notaris nomor 61 tanggal 12 April 2016, Notaris Teuku Arif Rahman, SH., dan telah diperbaharui dengan Akta Notaris nomor 145 Tanggal 31 Januari 2018 Notaris Teuku Arif Rahman, SH., sehingga susunan Dewan Pengawas PD. BPR BKK Tasikmadu adalah sbb:

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Ir. SITI MAISYAROCH, M.Si.	Anggota Dewan Pengawas	06/04/2016- 06/04/2019

- Seluruh Anggota Dewan Pengawas telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada Bank lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangannya, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Pengawas wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Melalui rapat-rapat Dewan Komisaris, pada tahun 2018 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sbb:

1. Direksi agar melakukan Pemaparan RKAT kepada pegawai dan menyampaikan laporan RBB jangan sampai terlambat/melebihi batas akhir pengiriman RKAT 2018
2. Pembangunan KC. Jenawi, KC. Ngargoyoso dan KC. Jumantono
3. Meningkatkan Penghimpunan dana dengan cara memberikan Hadiah langsung kepada nasabah penabung baru
4. Action Plan Penanganan Kredit Lancar dengan Tunggakan
5. Upayakan NPL maksimal 5%
6. Menindak tegas pegawai yang melakukan Fraud
7. Menindaklanjuti pemanfaatan aset tidak produktif
8. Melaksanakan monitoring Evaluasi kinerja capaian RKAT 2018
9. Melaksanakan Undian Simpanan
10. Melaksanakan Outbond dengan melihat capaian kinerja Desember 2018
11. Memberikan Tunjangan Jabatan sesuai capaian Kinerja

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	PD. BPR BKK Tasikmadu	Perusahaan Lain
DIDIK DARMADI, SE. MM.	nihil	nihil
LUGITO, SE.MM.	nihil	nihil
SRI UTAMI ISTIJANI, SE.	nihil	nihil

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham.
- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham.

E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Nama Anggota Dewan Pengawas	Kepemilikan Saham		
	PD. BPR BKK Tasikmadu	BPR Lain	Perusahaan Lain
Ir. SITI MAISYAROCH, M.Si.	nihil	nihil	nihil

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DENGAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

- Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.
- Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2018.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Pengawas	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	Rp. 118.277.440,-	Rp. 770.488.402 ,-
Tunjangan	Rp. 38.925.744,-	Rp. 103.512.218,-
Tantiem	Rp. 24.550.256,-	Rp. 88.653.702,-
Kompensasi berbasis saham	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko*) *) sudah termasuk dalam jumlah keseluruhan gaji	-	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	-	Rp.45.566.233,-

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 0.17 : 1
- rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 0.80 : 1
- rasio gaji Pengawas yang tertinggi dan terendah adalah 0.80 : 1
- rasio gaji Direksi tertinggi dan Pengawas tertinggi adalah 0.40 : 1
- rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 0.40 : 1

I. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS

Rapat-rapat Dewan Pengawas pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	PEMBAHASAN	PESERTA
1	03 April 2018	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan likuiditas Pemberian reward kinerja bagi pegawai Tindak lanjut surat teguran kantor Pajak Pratama Penutupan Linkage Progeam Bank Jateng Pelanggaran pakta integritas Kasi Pemasaran KC Jenawi 	<ol style="list-style-type: none"> Dewan Pengawas Direktur Utama Direktur Umum dan Kepatuhan Direktur Pemasaran
2	10 Juli 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja Renovasi pembangunan gedung (Jenawi, Ngargoyoso, Jumantono) Tindak lanjut temuan SKAI tentang fraud KC Jenawi Persiapan HUT RI 	<ol style="list-style-type: none"> Dewan Pengawas Direktur Utama Direktur Umum dan Kepatuhan Direktur Pemasaran
3	30 Oktober 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja masing-masing bidang Pemantauan pembangunan Kantor Cabang Kesepakatan tindak lanjut surat ijin Direktur Pemasaran 	<ol style="list-style-type: none"> Dewan Pengawas Direktur Utama Direktur Umum dan Kepatuhan
4	03 Desember 2018	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi kinerja Pengangkatan tenaga kontrak menjadi Calon Pegawai Persiapan audit tutup buku tahun 2018 dan audit AMJ Pengawasan proses hukum Polres terkait faud KC Jatiyoso 	<ol style="list-style-type: none"> Dewan Pengawas Direktur Utama Direktur Umum dan Kepatuhan

Data Kehadiran Anggota Dewan Pengawas pada Rapat Dewan Pengawas:

Nama Anggota Dewan Pengawas	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Ir. SITI MAISYARACH, M.Si.	4	100
Total rapat per tahun	4	100

J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total Fraud	-	-	-	-	-	2	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	2	-	-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	0	0	-	-

Pada tahun 2017 dan 2018 penyimpangan intern adalah kasus Fraud KC. Jatiyoso yang masih dalam proses Aparat Penegak Hukum.

K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Pada tahun 2018 tidak terdapat permasalahan hukum.

L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2018 tidak terdapat benturan kepentingan.

M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

No	Nama Penerima	Jumlah (Juta Rp)	Tanggal
-	-	-	-

Pada tahun 2018 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik.

N. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PD. BPR BKK Tasikmadu melakukan *self assessment* untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2018. Kertas kerja dan kesimpulan *self assessment* dilampirkan dalam laporan ini. Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit *self assessment* untuk periode 2018:

No	Faktor yang dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	1.13	0.45
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15%	1.13	0.40
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0%	0.00	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	3.50	0.35
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10%	2.10	0.26
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	1.83	0.25
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2,5%	1.50	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern*)	0%	0.00	0
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	1.50	0.23
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	1.00	0.17
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	1.50	0.15
	Nilai Komposit	90%		2.22
	Peringkat Komposit		Baik	

Secara umum hasil *self assessment* menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat Baik, namun masih terdapat kelemahan pada faktor 5 dan faktor 6, dan pada tahun 2019 akan diupayakan perbaikan nilai pada kedua faktor tersebut, antara lain melalui pemenuhan struktur organisasi dan pelaksanaannya.

Karanganyar, 16 April 2019
PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BKK TASIKMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

Ir. SITI MAISYAROCH, M.Si.
Dewan Pengawas

DIDIK DARMADI, SE., MM.
Direktur Utama